

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan data pantauan, perkembangan inflasi *month-to-month* (mtm) di Kabupaten Bandung pada Triwulan IV menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung mengalami tekanan pada tengah triwulan:

- **Oktober:** 0,39%
- **November:** 1,89% (Puncak inflasi di TW IV)
- **Desember:** 0,44%

Analisis Harga Barang Pokok & Jasa: Terjadi kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, terutama pada komoditas cabai, bawang merah, dan telur ayam di bulan November. Sebagai **daerah produsen** sekaligus **konsumen**, Kabupaten Bandung mengalami paradoks di mana kenaikan permintaan akhir tahun meningkatkan harga di tingkat pasar meskipun pasokan lokal tersedia.

Risiko ke Depan:

- **Cuaca Ekstrem:** Potensi gangguan panen pada awal tahun yang dapat memicu kenaikan harga komoditas hortikultura.
- **Base Effect:** Risiko kenaikan harga jasa transportasi dan logistik pasca libur Nataru yang mungkin berlanjut ke awal tahun.

Grafik 2 Inflasi 2025

Grafik 1 Inflasi TW II 2025

Komoditas hortikultura seperti **cabai rawit** mencatat lonjakan yang sangat tinggi pada bulan Desember, yaitu sebesar serta **bawang merah** yang naik tajam pada April sebesar **12,41%**, keduanya menjadi penyumbang utama inflasi. Sebaliknya, komoditas protein hewani seperti **daging ayam ras**, **telur ayam ras**, dan **rampela hati ayam** justru menjadi penyumbang deflasi, dengan penurunan signifikan terutama pada Juni, seperti rampela hati ayam yang turun hingga **19,93%** secara y-on-y, memberikan bantalan terhadap lonjakan harga pangan lainnya.

Tekanan inflasi juga diperkuat oleh tantangan menjelang dan sesudah Natal dan Tahun Baru 2025, di mana permintaan terhadap komoditas seperti **beras**, **daging**, dan **bumbu dapur** cenderung meningkat. Lonjakan konsumsi masyarakat dalam periode tersebut berdampak langsung pada peningkatan harga komoditas tertentu, misalnya beras dan bahan bakar rumah tangga yang masing-masing mencatat kenaikan pada Juni sebesar **0,69%** dan **2,91%**. Selain itu, masuknya **masa tahun ajaran baru** pada pertengahan tahun turut berkontribusi terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga, khususnya untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan penunjangnya, yang pada akhirnya mendorong peningkatan harga pada beberapa komoditas dan jasa lainnya.

Meskipun secara umum pergerakan inflasi Kabupaten Bandung masih dalam koridor target TPID (1,5%-3,5%), fluktuasi harga yang tajam pada beberapa komoditas pangan utama seperti cabai rawit, kopi bubuk, dan minyak goreng menunjukkan perlunya antisipasi yang lebih kuat terhadap risiko inflasi musiman dan struktural. Tantangan dalam menjaga kestabilan pasokan menjelang HBKN dan menghadapi lonjakan permintaan musiman menjadi perhatian utama agar tekanan inflasi tidak melebar dan mengganggu daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Curah hujan yang tinggi dikhawatirkan akan mempengaruhi stok ketersediaan bahan pangan di pasar sebab tingginya curah hujan dapat mengakibatkan gagal panen sehingga supply di pasar akan menurun sementara permintaan meningkat saat HBKN. Menanggulangi hal tersebut upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemkab Bandung adalah membuat Lumbung Pangan Masyarakat, meningkatkan CPP Pemerintah, melaksanakan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah untuk *shock absorber* terhadap dampak inflasi yang ditujukan kepada masyarakat miskin ekstrim terdampak inflasi, serta kelancaran distribusi pangan dan koordinasi intens antara Tim TPID Kabupaten Bandung, TPID Provinsi Jawa Barat, ataupun dengan TPIN.

Mengingat nilai konsumsi Kabupaten Bandung berada di posisi ke-2 terbesar di Provinsi Jawa Barat, satu posisi setelah Kota Bekasi ditambah dengan jumlah populasi terbesar ke-2, maka dalam upaya pengendalian inflasi Kabupaten Bandung diperlukan upaya yang ekstra dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bandung agar ketersediaan pasokan pangan terpenuhi sehingga tidak terjadi kelangkaan yang akan memicu kenaikan inflasi terutama untuk 12 komoditas kebutuhan pokok.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kabupaten Bandung senantiasa berupaya menjaga agar inflasi Kabupaten Bandung tetap stabil pada target rentang inflasi antara 1,5% hingga 3,5% sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2025. Target tersebut diupayakan melalui upaya Pemda untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran Bahan Pokok (*volatile good*) yang menjadi penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi Kabupaten Bandung dengan strategi 4 K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi tersebut dituangkan kedalam program kerja yang dilaksanakan oleh anggota teknis Tim TPID Kabupaten Bandung dan tercatat dalam Rencana Aksi Daerah dalam Upaya Penanganan Inflasi Tahun 2025 diantaranya:

Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Program Kerja

Keterjangkauan Harga

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebagai Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Gelar pangan murah sebagai program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan sebagai program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Ketersediaan Pasokan

1. Melakukan Fasilitasi Lumbung Pangan sebagai program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Fasilitasi Bibit Komoditas rentan inflasi seperti Bawang Merah, Padi dan Cabai Merah
3. Pengembangan budi daya ayam, itik, puyuh petelur, itik pedaging dan sapi perah
4. Pengembangan bawang merah, cabai merah dan sarana prasarana produksi lainnya
5. Monitoring stok bahan pokok penting di pasar
6. Melaksanakan pengembangan usaha pangan masyarakat

Kelancaran Distribusi

Melaksanakan monitoring dan pengawasan angkutan barang

Komunikasi Efektif

Melaksanakan koordinasi intens antara Tim TPID Kabupaten Bandung, TPID Provinsi Jawa Barat, ataupun dengan TPIN melalui rapat koordinasi, capacity building maupun konsultasi, monitoring stok bapokting di pasar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Meskipun Kabupaten Bandung adalah daerah produsen, sebagian besar hasil produksi langsung terserap ke pasar induk luar daerah, sehingga terjadi *backflow* yang meningkatkan biaya logistik saat kembali ke pasar lokal.
- Angka lonjakan inflasi sebesar 1,89% pada November menunjukkan adanya ketidaksiapan antisipasi terhadap pergeseran pola konsumsi masyarakat sebelum memasuki bulan Desember.
- Ketergantungan pada Faktor Musiman pada harga pangan terhadap pola cuaca yang

memengaruhi produktivitas petani lokal.

- Melaksanakan Monitoring harga-harga kebutuhan dan evaluasi secara langsung maupun melalui aplikasi yang datanya di isi oleh unomerator yang berada di tiap tiap pasar yg berada di wilayah kabupaten Bandung. Data yang di peroleh dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan.
- Telah dilaksanakan Gelar Pangan Murah sebanyak 77 kegiatan pada tahun 2025.
- Penyaluran CPPD terhadap masyarakat yang terdampak inflasi dan terdampak bencana.
- Melaksanakan Bazar Ramadhan dengan menghadirkan komoditi dengan harga yang terjangkau menjelang Idul Qurban 1446 H.
- Melaksanakan pengawasan Minyakita dengan tim pengawas yang terdiri dari metrologi legal, dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten bandung, telah melakukan pengawasan atas kebenaran kuantitas minyakita
- Telah pengawasan pompa ukur bbm di spbu jalur mudik/balik wilayah kabupaten bandung dengan jumlah SPBU yang diawasi sebanyak 43 SPBU.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitasnya di rentang 1,5% hingga 3,5% menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru 2025, Tim TPID Kabupaten Bandung dapat mengimplementasikan beberapa strategi:

1. **Pemantauan Pasar:** Tim TPID harus terus memantau kondisi pasar secara cermat, khususnya terkait dengan kenaikan permintaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Dengan pemantauan yang cermat, mereka dapat mengantisipasi perubahan-perubahan harga yang signifikan.
2. **Koordinasi :** Memerintahkan anggota TPID untuk melakukan intervensi yang terintegrasi mulai dari *early warning system* terhadap komoditas yang mulai naik hingga intervensi harga melalui **Kios Inflasi Si Pintar Bedas** yang intensif terhadap bahan pokok tersebut;
3. **Stok Cadangan:** Membangun stok cadangan bahan pokok yang cukup di daerah tersebut sebelum memasuki periode peningkatan permintaan dapat membantu mengurangi fluktuasi harga. Hal ini memungkinkan untuk menghadapi lonjakan permintaan tanpa harus mengandalkan impor yang mungkin mengalami keterlambatan atau hambatan lainnya.
4. **Pemantauan Harga Pasar dari BPS Kabupaten Bandung:** Memperluas sampling pemantauan harga BPS tidak hanya pada Pasar Sehat Soreang dan Pasar Kopo saja, sebab Kabupaten Bandung dengan jumlah 33 Kecamatan memiliki pasar yang sangat banyak sehingga jika jumlah pemantauan harga yang dilaksanakan BPS diperluas, maka nilai inflasi yang diumumkan secara reguler pada website resminya akan lebih mewakili atau merepresentasikan secara nyata volatilitas inflasi yang terjadi di Kabupaten Bandung.
5. **Kekurangan:** Masih terdapat jeda waktu (*time lag*) antara deteksi kenaikan harga di awal November dengan eksekusi pasar murah, sehingga inflasi sempat menyentuh angka di atas 1%.